

SOAL TATA KELOLA PSDA & INOVASINYA

JAKARTA, 19 SEPTEMBER 2018

Hariadi Kartodihardjo

TATAKELOLA

- **ATURAN:** BUKAN DIBATASI REGULASI FORMAL, TETAPI “ATURAN TERPAKAI” (rule in use)
- **KOLEKTIF:** MELIBATKAN KONTROL TIMBAL–BALIK, HAK SETIAP ORANG TETAPI SETIAP ORANG WAJIB MENERIMA KEPUTUSAN KOLEKTIF
- **PENGAMBILAN KEPUTUSAN:** HUBUNGAN SEMUA ELEMEN YANG DAPAT MENYETUJUI DICAPAINYA TUJUAN TERTENTU
- **TIDAK ADA SISTEM KONTROL FORMAL:** ADA/TDK ADA KEKUATAN YANG DAPAT MENDIKTE HUBUNGAN-HUBUNGAN DAN HASILNYA

Keterkaitan & Ketergantungan

EKONOMI, SOSIAL, LINGKUNGAN HIDUP: PERUBAHAN IKLIM—REDD+



INTENSITAS PENGELOLAAN & PEMANFATAN SDA: KK (22 jt, 4,8 non hutan) & HL (31 jt, 7,1 non hutan):

1. Kekosongan pengelolaan
2. Kemandirian pengelolaan
3. Kerjasama
4. Efisiensi Perizinan
5. Biaya dan Tarif

PENINGKATAN KAPASITAS EKONOMI LOKAL (Di semua fungsi hutan—pembangunan desa)

1. Pendidikan dan Kesehatan
2. Infrastruktur Sosial Ekonomi
3. Kewirausahaan
4. Efisiensi & Akses perizinan

PERIZINAN & PENGENDALIAN PEMANFAATAN SDA: (HPT+HP+HPK 76 jt, 27,4 non hutan) & WUP, APL/Kebun

1. Struktur Pasar Hasil Hutan
2. Biaya transaksi perizinan
3. Pengembangan usaha: HA, HT dll
4. Policy thd prsh berkinerja buruk



PENGUATAN INSTRUMEN PERLINDUNGAN P-LH: Kebijakan, Kegiatan

1. Ekonomi LH
2. Perizinan Lingkungan: Wilayah perizinan—quota
3. AMDAL, RPL-RKL
4. Baku Mutu
5. Peraturan & Anggaran
6. Analisis Resiko & Audit LH

PERENCANAAN EKOREGION DAN ANTAR WILAYAH: Skala Nasional

1. RPPLH, KLHS
2. Tata Ruang
3. KPH
4. Penetapan kawasan hutan
5. Inv & solusi klaim kws htn
6. Kinerja DD Wilayah

KAPASITAS LEMBAGA & PENEGAKAN HUKUM: Skala Nasional

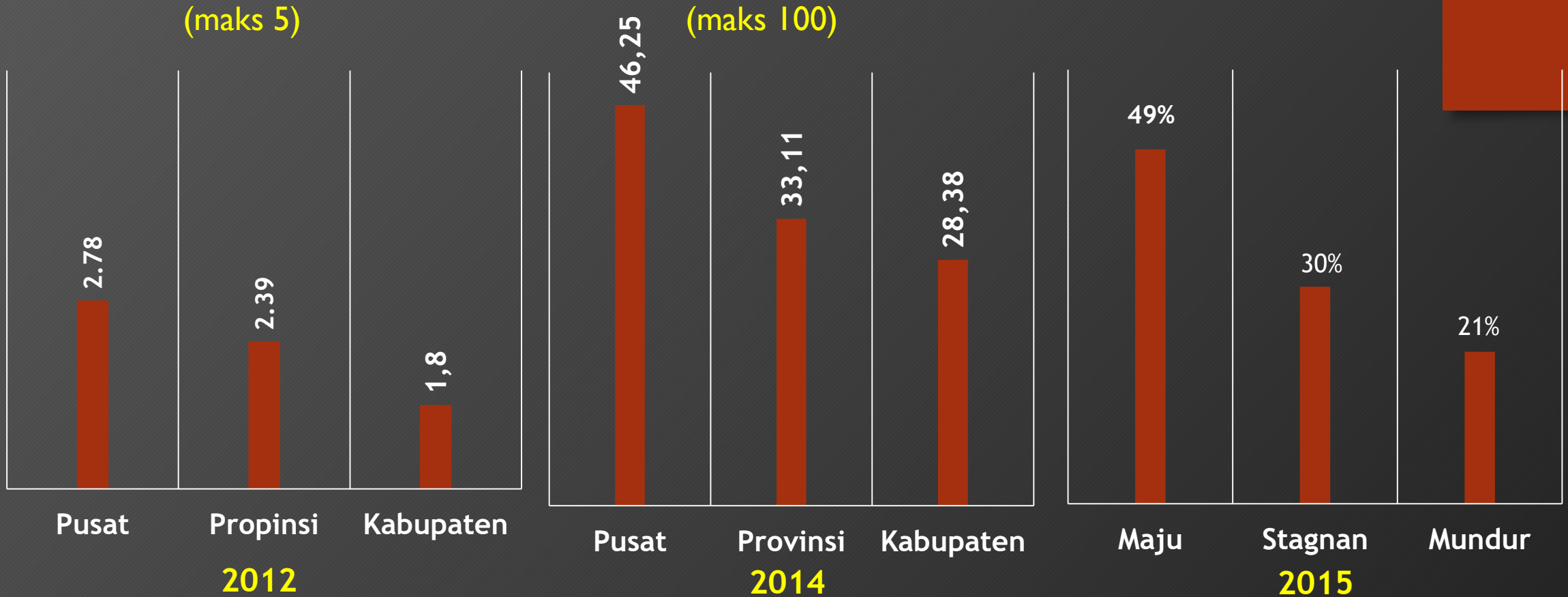
1. Penguatan kapasitas
2. Review izin
3. Mediasi
4. Solusi Keterlanjuran



**SDM—REFORMASI BIROKRASI—UKURAN KINERJA-POLICY-PROGRAM-MASALAH—LITBANGLATLUH
KOHERENSI PROGRAM UNTUK SUBSYEK/WILAYAH TERTENTU: KPH, KAB, PROP, NASIONAL**

- Alokasi SDA resmi/de jure bersaing dng alokasi tdk resmi/de facto;
- Relasi program nasional & fakta di tapak
- Melampaui pendekatan hukum—kontestasi pengaruh (birokrasi, gerakan sosial, percepatan ekonomi).

DINAMIKA KONDISI TATA KELOLA HUTAN 2012, 2014, 2015



Indeks rata-rata tata kelola hutan, 2012
Keseluruhan 2,33

Indeks rata-rata tata kelola hutan, 2014
Keseluruhan 36

Survei key stakeholders Kondisi Tata Kelola Hutan (n: 35), 2015
Maju (49%)-Stagnan (30%)-Mundur(21%); GN-PSDA - 0.5 (skala -1 s.d 1) 13 provinsi.

SITUASI GOOD/BAD GOVERNANCE

- KEBIJAKAN SEBAGAI **SOLUSI (1)** ATAU SEBAGAI **ONGKOS/BIAYA (2)**?
 - SOLUSI (1), JIKA DIWAJIBKAN DAN PEMERINTAH/PEMDA—SWASTA **KONSISTEN** MENJALANKANNYA
 - ONGKOS (2), JIKA KEBIJAKAN DAPAT **DIGANTI DENGAN ONGKOS** TTN YG MASIH BISA/TDK BISA DITANGGUNG OLEH PENDAPATAN USAHA
- **KONSISTEN** ~ GOOD GOVERNANCE
- PADA “BAD GOVERNANCE” **KEBIJAKAN = ONGKOS**, BUKAN SOLUSI SUATU MASALAH
- KEPUTUSAN PERUSAHAAN **TERGANTUNG SIKAP** PEMERINTAH/PEMDA

DI DALAM KONDISI **BAD GOVERNANCE**

- IDE MASY YANG BAIK (UNTUK KEPENTINGAN PUBLIK) TIDAK DITERIMA KARENA YG DIUTAMAKAN **KEPENTINGAN KELOMPOK**;
- KEPUTUSAN BAIK (UNTUK KEPENTINGAN PUBLIK) TIDAK DIEKSEKUSI KARENA ADA **TEKANAN YANG MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN KELOMPOK**;
- **TIDAK ADA PARTISIPASI** DAN KETERBUKAAN DALAM PENETAPAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN (PERIZINAN);
- DIGUNAKANNYA **KEWENANGAN LEMBAGA PUBLIK UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI/KELOMPOK**
- TIMBULNYA “**NEGATIVE SYMBOLIC POWER**” YANG LEBIH MENENTUKAN APA YANG SESUNGGUHNYA TERJADI DI LAPANGAN.

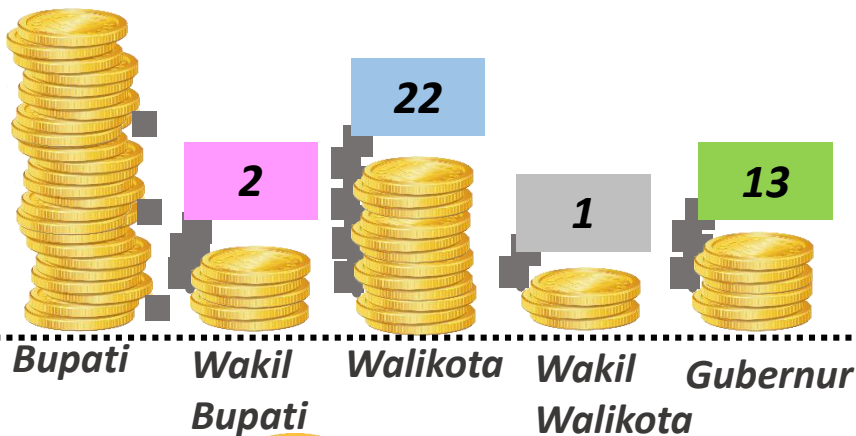
SITUASI DAN KORUPSI PILKADA: Contoh Sempurna Pelaks State Capture

KORUPSI KEPALA DAERAH



2004 - 2018

50 88 Kepala Daerah Terjerat Kasus Korupsi
(Data yang ditangani KPK per 3 April 2018)



22 DARI 34
PROVINSI
Kepala Daerahnya Terjerat
KORUPSI



DITANGANI KPK 2004 – 2018 Berdasarkan Sektor dan Modus

11 Perkara Pengadaan Barang & Jasa

20 Perkara Pengelolaan Anggaran

5 Perkara Perizinan

Perkara Pemerasan 2

Perkara Penyalahgunaan
Kewenangan 3

51 Perkara Penyuapan

6 Perkara TPPU

5 Gratifikasi

PROVINSI VS KORUPSI

22 Provinsi yang Kepala Daerahnya terjerat Korupsi
(Data KPK 2004-2018)

No	Provinsi	Jumlah Perkara
1	DI Aceh	2
2	Bengkulu	2
3	Jawa Barat	12
4	Jawa Tengah	6
5	Jawa Timur	8
6	Kalimantan Selatan	1
7	Kalimantan Tengah	1
8	Kalimantan Timur	6
9	Maluku Utara	3
10	Nusa Tenggara Barat	3
11	Nusa Tenggara Timur	2

No	Provinsi	Jumlah Perkara
12	Papua	5
13	Riau	5
14	Kep. Riau	2
15	Sulawesi Selatan	2
16	Sulawesi Tengah	1
17	Sulawesi Tenggara	5
18	Sulawesi Utara	5
19	Sumatera Selatan	6
20	Sumatera Utara	9
21	Jambi	1
22	Lampung	1

103 KASUS

75 BUPATI WALIKOTA

13 GUBERNUR

Latar Belakang Studi Potensi Benturan Kepentingan dalam Pendanaan Pilkada 2017

Rp20-30M Bupati/Walikota, Rp20-100M Gubernur (Litbang, Kemendagri)

- Rata-rata Rp 6,7M (613 calon) + 744M (7 orang calon)
- Rp 0 = 4 calon
- Harta minus = 2 calon (LHKPN-KPK)

1. Biaya Pilkada mahal

2. Harta Cakada/Cawakada Rendah

Sumbangan

Fakta Korupsi Kepala Daerah

77 kasus pada 59 kepala daerah (KPK)

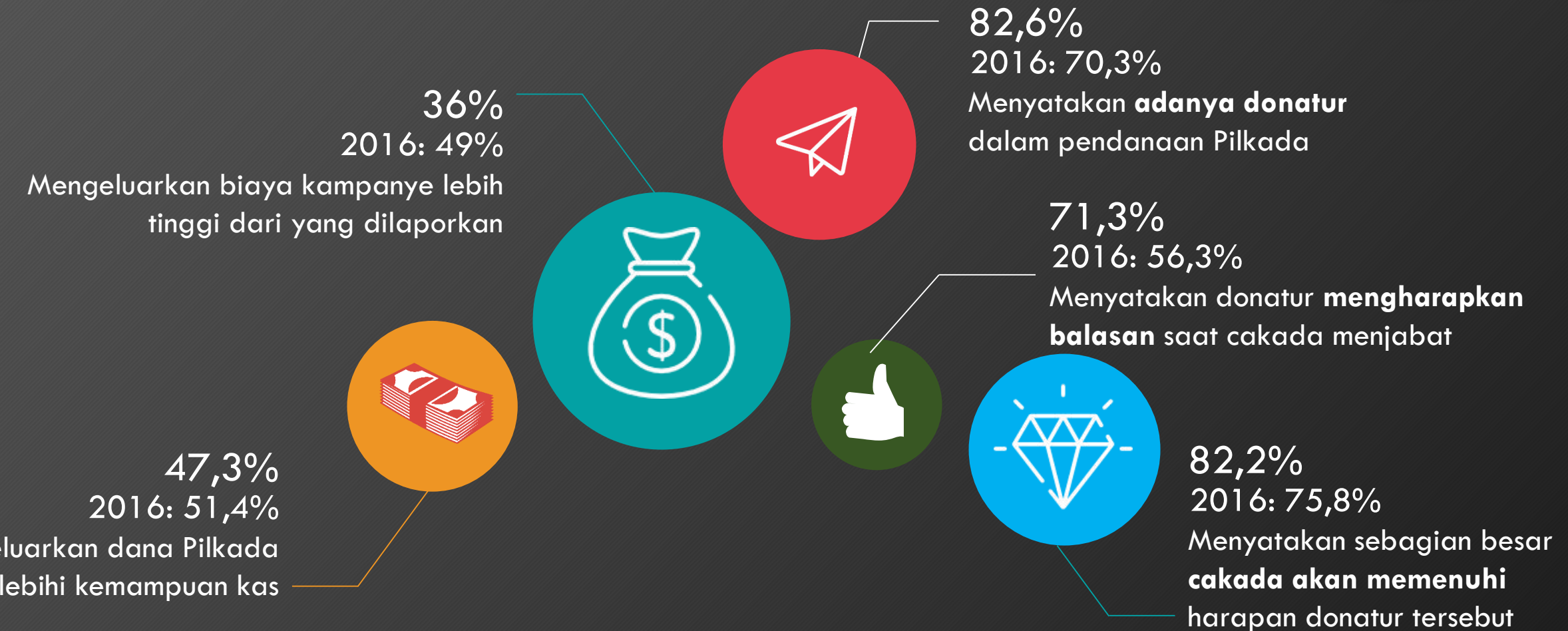
Apakah sumbangan untuk biaya kampanye menimbulkan potensi benturan kepentingan?

Survei lanjutan dari tahun 2016

Mengidentifikasi Potensi Benturan Kepentingan Calon Kepala Daerah pada Pendanaan Pilkada

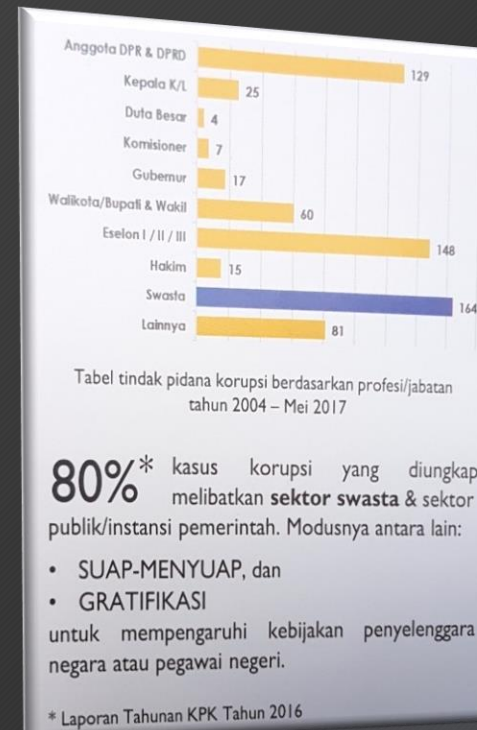
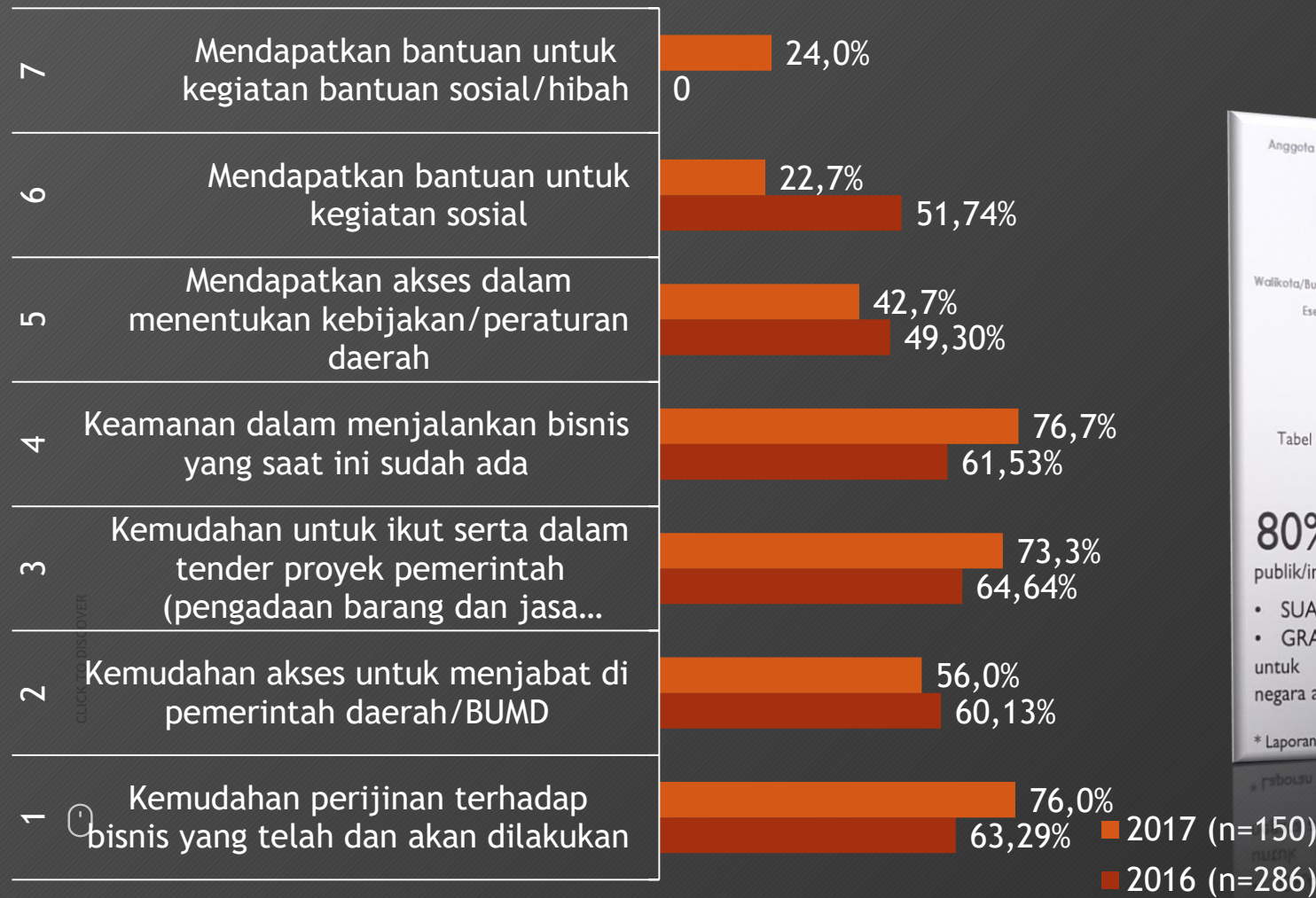
PENELITIAN KPK DAN PROGRAM PENCEGAHAN

SURVEY POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PENDANAAN PILKADA 2016-2017



PENELITIAN KPK DAN PROGRAM PENCEGAHAN

HARAPAN DONATUR KEPADA CAKADA



Prioritas:

- keamanan dalam menjalankan bisnis
- kemudahan perijinan
- kemudahan ikut tender proyek pemerintah

KASUS KORUPSI BERDASARKAN JENIS PERKARA KORUPSI

NO.	JENIS PERKARA	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	JUMLAH	%
1	Pengadaan Barang/Jasa	2	12	8	14	18	16	16	10	8	9	15	14	14	8	164	26.5%
2	Perizinan	-	-	5	1	3	1		0		3	5	1	1	1	21	3.4%
3	Penyuapan	-	7	2	4	13	12	19	25	34	50	20	38	79	37	340	55.0%
4	Pungutan	-	-	7	2	3	-	-	0	-	1	6	1	1	0	21	3.4%
5	Penyalahgunaan Anggaran	-	-	5	3	10	8	5	4	3	-	4	2	1	1	46	7.4%
6	TPPU	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	5	1	3	2	19	3.1%
7	Merintang Proses KPK	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	0	0	2	7	1.1%
JUMLAH		2	19	27	24	47	37	40	39	48	70	58	57	99	51	618	100.0%

KORUPSI SUMBERDAYA ALAM

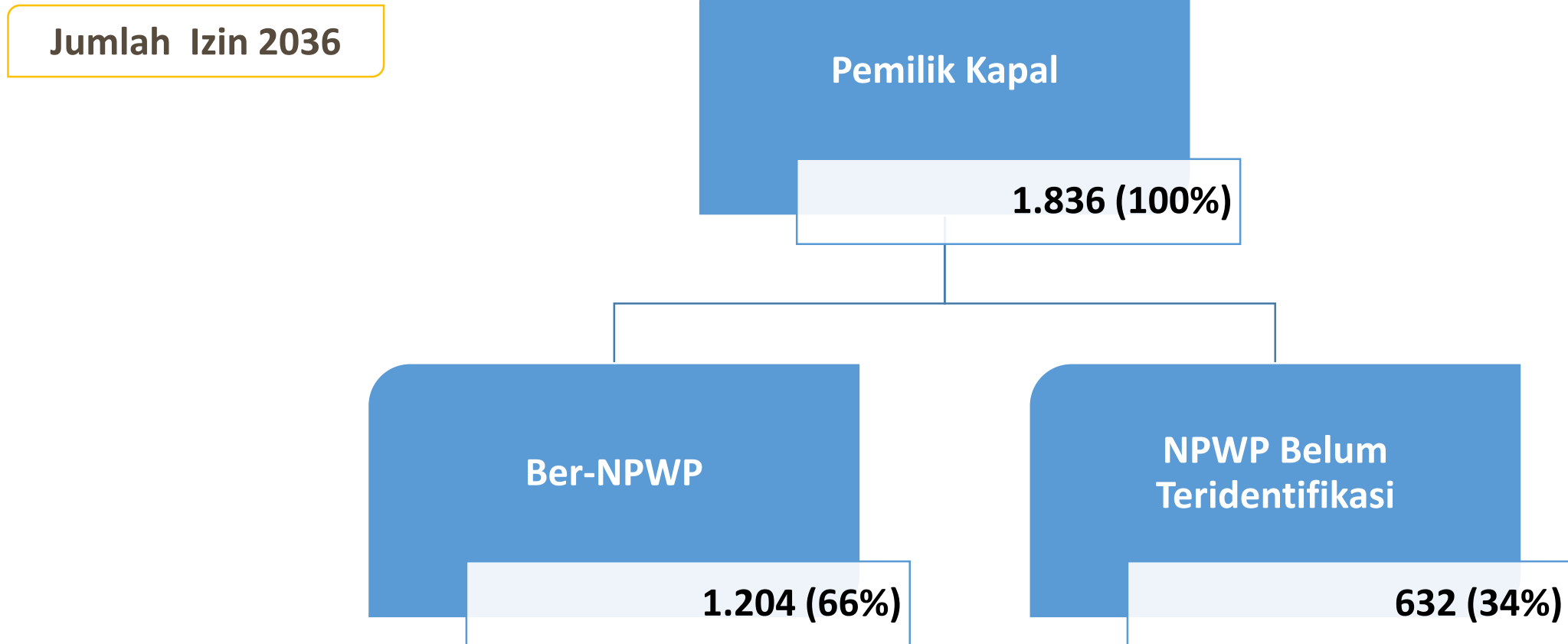
KAJIAN POTENSI KERUGIAN NEGARA KPK

- **Perizinan kehutanan** terdapat uang suap/peras antara Rp 680 juta sd Rp 22 milyar per perusahaan per tahun (KPK, 2013). Kerugian negara akibat pembalakan liar Rp 35 trilyun per tahun (2015).
- Potensi PNBP **sektor kelautan** Rp 70 triliun/tahun tidak sebanding dengan PNBP Rp 230 milyar/tahun (KPK, 2014).
- **Kekurangan bayar pajak tambang** di kawasan hutan sebesar Rp 15,9 trilyun pertahun hanya di Kalimantan, Sumatra dan Papua dan ditemukan 1.052 tambang di kawasan hutan yang tidak mempunyai izin pinjam pakai kawasan hutan (KPK, 2015).
- Periode 2003–2014, potensi 77% sd 81% **produksi kayu bulat** tidak tercatat, negara dirugikan antara Rp 5,24 trilyun hingga Rp 7,24 trilyun per tahun. Pelaksanaan konversi hutan untuk perkebunan antara Rp 49,8 trilyun sd Rp 66,6 trilyun per tahun (2015).
- **Selisih luas data PBB perkebunan sawit** di Riau, Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan: 1.483.085 Ha. Ditemukan pula tanaman kebun berada di luar lokasi izin: dng tambang 1,3 juta Ha, dengan hutan produksi 883 ribu Ha, degan kubat gambut 801 ribu Ha. Pajak hanya Rp 22,2 T dari yg seharusnya Rp 40 T (2016-2017).

REKAPITULASI IUP PER PROVINSI (data ESDM per 20 Nov 2017)

No	PROVINSI	TOTAL	C&C	Aktif	Habis Masa Berlaku	Non-C&C	No	PROVINSI	TOTAL	C&C	Aktif	Habis Masa Berlaku	Non-C&C
		CnC + Non CnC							CnC + Non CnC				
1	PUSAT/PMA	102	96	78	18	6	20	NTT	226	195	141	54	31
2	NAD	40	33	25	8	7	21	KALBAR	461	360	274	86	101
3	SUMUT	8	7	7	0	1	22	KALTENG	661	494	310	184	167
4	SUMBAR	282	159	83	76	123	23	KALSEL	788	445	203	242	343
5	RIAU	37	37	26	11	0	24	KALTIM	1193	949	370	579	244
6	JAMBI	239	198	102	96	41	25	KALTARA	95	91	83	8	4
7	SUMSEL	139	138	131	7	1	26	SULAWESI UTARA	127	74	16	58	53
8	BENGKULU	49	46	37	9	3	27	SULAWESI TENGAH	337	232	117	115	105
9	LAMPUNG	183	164	144	20	19	28	SULAWESI SELATAN	422	219	82	137	203
10	BANGKA BELITUNG	1166	955	505	450	211	29	SULAWESI TENGGARA	384	300	243	57	84
11	KEP. RIAU	125	100	21	79	25	30	GORONTALO	26	21	16	5	5
12	DKI JAKARTA	0	0	0	0	0	31	SULAWESI BARAT	28	16	4	12	12
13	JAWA BARAT	623	334	71	263	289	32	MALUKU	96	87	11	76	9
14	JAWA TENGAH	157	143	17	126	14	33	MALUKU UTARA	233	181	116	65	52
15	DI. YOGYAKARTA	12	11	10	1	1	34	PAPUA	103	69	50	19	34
16	JAWA TIMUR	491	261	95	166	230	35	PAPUA BARAT	58	22	19	3	36
17	BANTEN	105	66	34	32	39	TOTAL		9074	6565	3487	3078	2509
18	BALI	11	1	1	0	10							
19	NTB	67	61	45	16	6							

Data Umum Perpajakan Pemilik Kapal (Per Jan. 2015)



*Berdasarkan data Pemilik Kapal > 30 GT Per Januari 2015

Tidak ada mekanisme integrasi perizinan dalam skema satu peta

NO	PROPINSI	LUASAN TUMPANG TINDIH HGU (HA)			
		IZIN PERTAMBANGAN	IUPHHK-HTI	IUPHHK-HA	KUBAH GAMBUT
1	Aceh	33,204	8,499	11,608	-
2	Sumatera Utara	11,420	6,041	8,918	5
3	Sumatera Barat	9,304	9,841	-	-
4	Riau	34,038	17,792	-	245,546
5	Kep. Riau	5	-	-	-
6	Jambi	26,749	8,329	1,053	44,499
7	Bengkulu	60,267	-	-	-
8	Sumatera Selatan	245,175	40,056	5,765	147,764
9	Bangka Belitung	11,882	4,524	-	-
10	Lampung	56,744	2,932	-	-
11	Jawa Barat	1,938	-	-	-
12	Banten	763	-	-	-
13	Kalimantan Barat	615,052	15,471	4,122	119,436
14	Kalimantan Tengah	396,162	81,834	86,484	152,422
15	Kalimantan Selatan	228,631	89,973	21,213	71,080
16	Kalimantan Timur dan Utara	1,116,103	240,03	99,09	-
			9	0	
18	Sulawesi Utara	4,433	68	308	-
19	Gorontalo	8,543	-	-	-
20	Sulawesi Tengah	55,389	6,799	3,282	-
21	Sulawesi Tenggara	14,955	549	-	-
22	Sulawesi Barat	3,885	420	-	-
23	Sulawesi Selatan	26,903	422	-	-
25	Maluku Utara	15,251	-	9,938	-
26	Papua Barat	5,605	923	70,829	-
27	Papua	35,450	-	27,054	20,955
	TOTAL	3,017,851	534,512	349,664	801,707

- Mekanisme verifikasi lahan tidak dilakukan oleh pemberi izin dan tidak ada instrumen verifikasi antar lintas perizinan dan tata guna lahan karena tidak ada satu peta yang sama yang menjadi pegangan dalam pemberian izin
- Akibatnya terjadi tumpang tindih:
 - HGU dengan Izin Pertambangan (3,01 juta ha)
 - HGU dengan IUPHHK-HTI (534 ribu ha)
 - HGU dengan IUPHHK-HA (349 ribu ha)
 - HGU dengan Kubah Gambut (801 ribu ha)

Luasan Tumpang Tindih HGU Perkebunan Kelapa Sawit dengan Izin-izin Lain dan Lahan Kubah Gambut berdasarkan Propinsi di Indonesia, 2016

Sumber: Dari berbagai sumber, 2016 (diolah)

MEKANISME TERJADINYA KORUPSI

Tiga Aspek Penyelenggaraan Perizinan

1. Aspek Layanan Publik

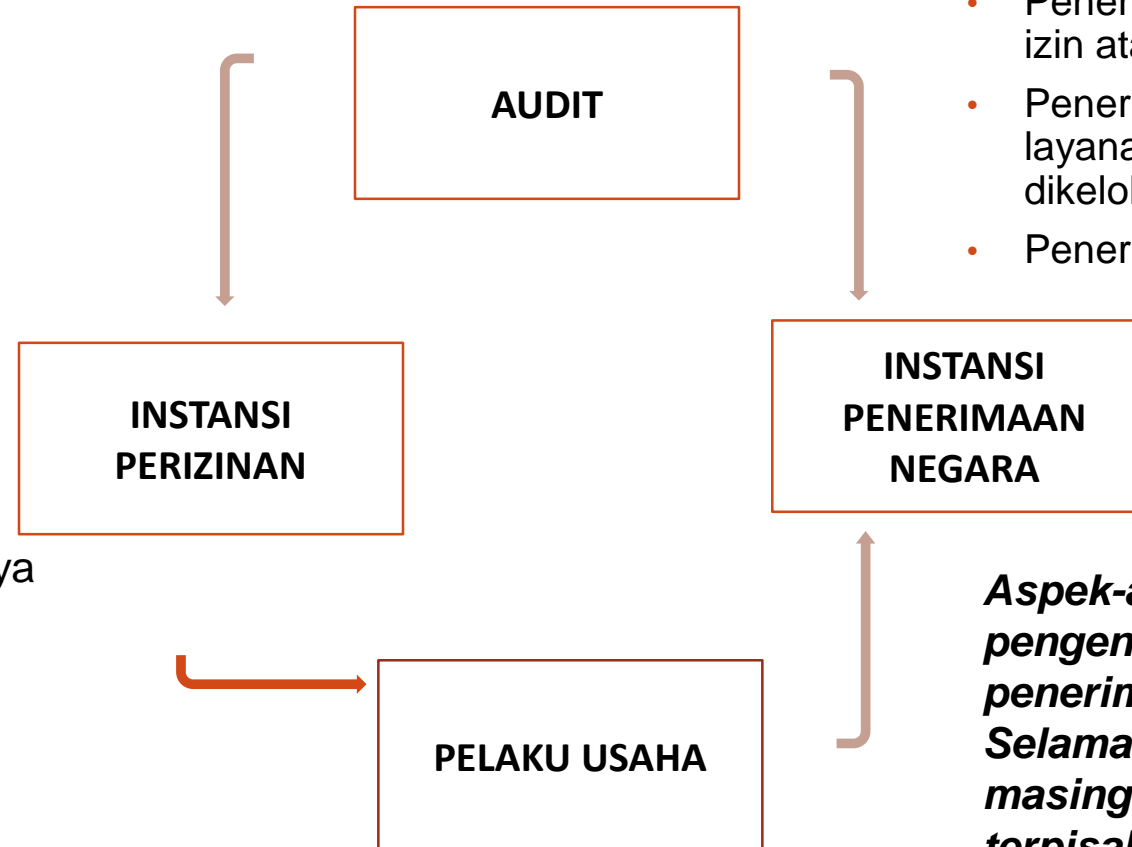
- Standar layanan publik.
- Good governance.
- Keterbukaan informasi publik.

2. Aspek Pengendalian

- Pemenuhan kewajiban yang diatur oleh undang-undang /aturan sektoral.
- Pelaksanaan kegiatan perizinan sebagaimana tujuan diberikannya izin.
- Azas dalam hukum administrasi negara.
- Layanan publik yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- Azas-azas umum pemerintahan yang baik.

3. Aspek Penerimaan Negara

- Penerimaan negara dari penerbitan izin atau layanan lainnya (retribusi).
- Penerimaan negara berkaitan dengan layanan atau aset negara yang dikelola (royalty atau PNBP).
- Penerimaan negara dari pajak.



Aspek-aspek dalam perizinan, baik itu pengendalian, layanan publik, dan penerimaan negara saling berkaitan. Selama ini penegakan hukum atas masing-masing aspek dilakukan secara terpisah.

RELASI YANG DIBENTUK OLEH INSTITUSI PSEUDO— LEGAL MEMECAH PELAKSANAAN PEMERINTAHAN MENJADI DUA URUSAN YANG MENJADI SATU KESATUAN.

Corruption type:
revolving doors,
rent-seeking behaviour,
bribery and extortion

Pertama, urusan formal sebagai bentuk pelaksanaan tugas negara. Menggunakan segala bentuk simbol-simbol pemerintahan resmi seperti kop surat, ruang rapat, honorarium dari APBN/APBD, dlsb.

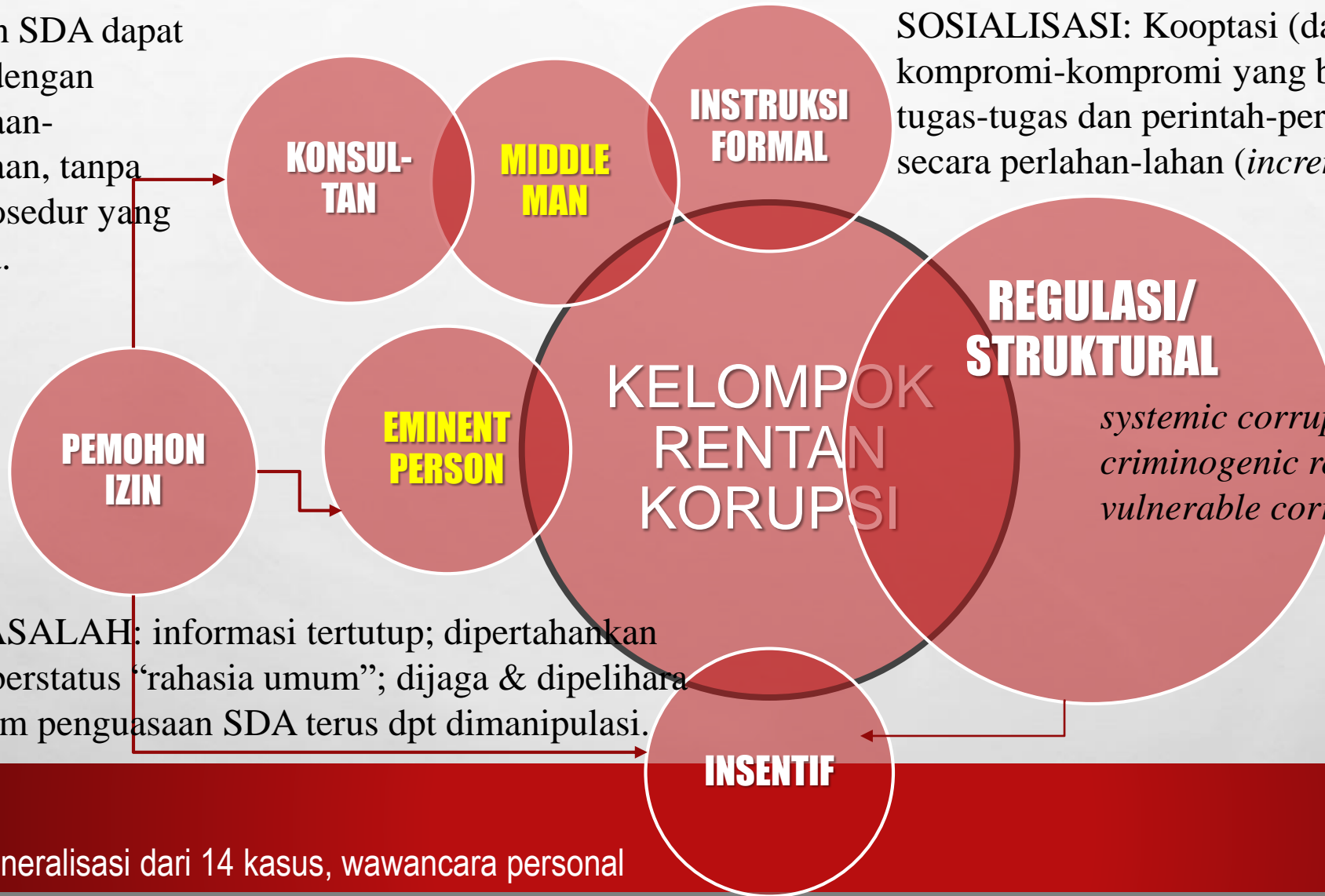
Kedua, urusan pelayanan dan hubungan dengan masyarakat yang dilipat menjadi urusan personal antara pejabat, konsultan dan pengusaha.

Disebut “pseudo—legal” karena bentuk institusi itu semacam *hybrid* antara legal dan extra-legal

Sumber: Generalisasi dari 14 kasus, wawancara personal

INSTITUSI PSEUDO—LEGAL

MENJADI MEDIUM penguasaan SDA dapat diperoleh dengan keistimewaan-keistimewaan, tanpa melalui prosedur yang seharusnya.



SOSIALISASI: Kooptasi (dari pimpinan atau klien), kompromi-kompromi yang berjalan seiring dengan tugas-tugas dan perintah-perintah, serta berjalan secara perlahan-lahan (*incremental*)

AKAR MASALAH: informasi tertutup; dipertahankan agar tetap berstatus “rahasia umum”; dijaga & dipelihara agar medium penguasaan SDA terus dpt dimanipulasi.

Sumber: Generalisasi dari 14 kasus, wawancara personal

Analisis CIA dan Identifikasi BT

TITIK KORUPSI DALAM ALUR USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU (UPHHK)

Bisnis proses dan sendi-sendi tata kelola usaha PHHK

Sumber: KPK, 2014



PROSES MENYIMPANG PERIZINAN YG DITEMUKAN:

- a. Manipulasi peta,
- b. Pemerasan,
- c. Tawaran tambahan atau pengurangan luas izin sebagai alat negosiasi,
- d. Biaya pengesahan dokumen AMDAL dan Izin Lingkungan,
- e. Memperlambat proses,
- f. Proses tidak melalui BKPM/D atau PTSP,
- g. Adanya konsultan sebagai arena transaksi yang sudah ditunjuk oleh pejabat tertentu.



Potensi Moral Hazard dlm Amdal dan IL

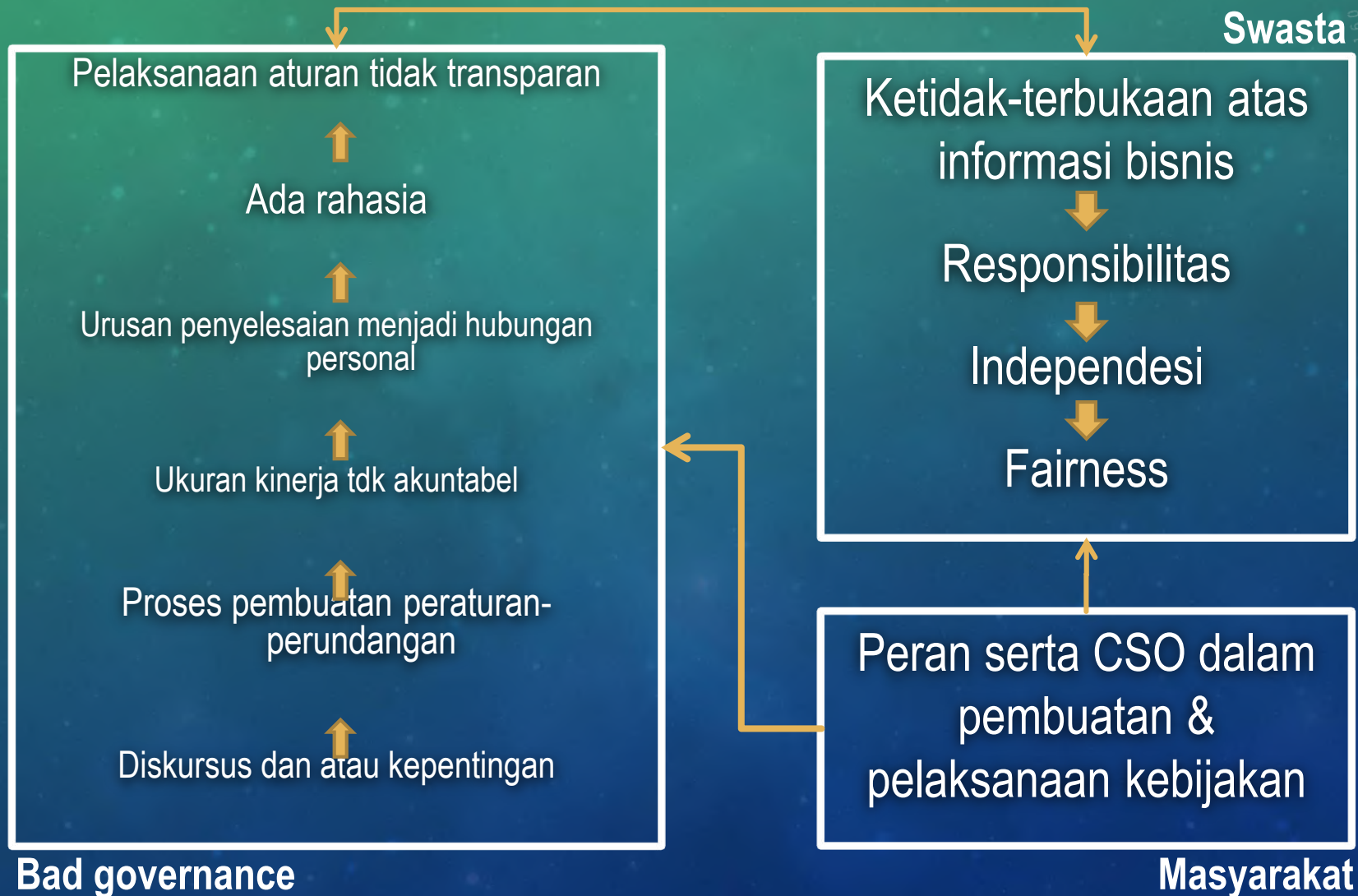
PROSES	Pemerintah	Konsultan	Pemrakarsa	Masy	JUMLAH
Penyusunan Dokumen	6	4	2	1	13
Penilaian Dokumen	6	4	1	1	12
Penerbitan SKKL dan IL	4	1	-	-	5
Sistem Standardisasi	2	-	-	-	2
JUMLAH	18	9	3	2	32

Sumber: Evaluasi Bersama KLHK, 2017

HAMBATAN BIROKRASI, HAMBATAN MASYARAKAT

PENGARUH BAD GOVERNANCE THD GCG

KPK & Peran Profesional



ROADMAP: KONGRES INTERNASIONAL TENURIAL OKT 2017





UPAYA & INOVASI

9 PROGRAM KORSUPGAH KPK

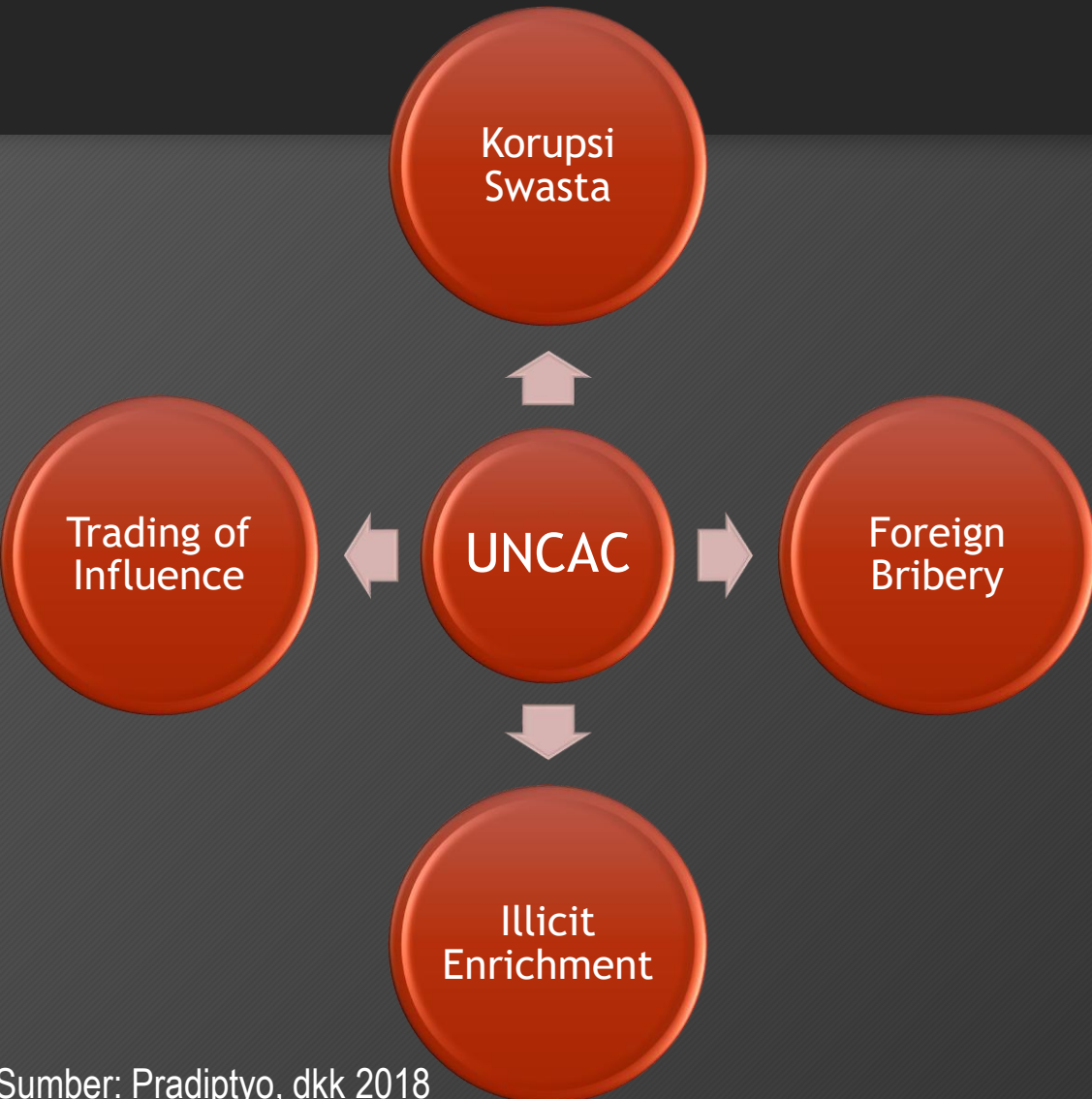


3 LANGKAH PENDEKATAN PENCEGAHAN:

#Evidence Based, #Living Documents, #Beyond Corruption

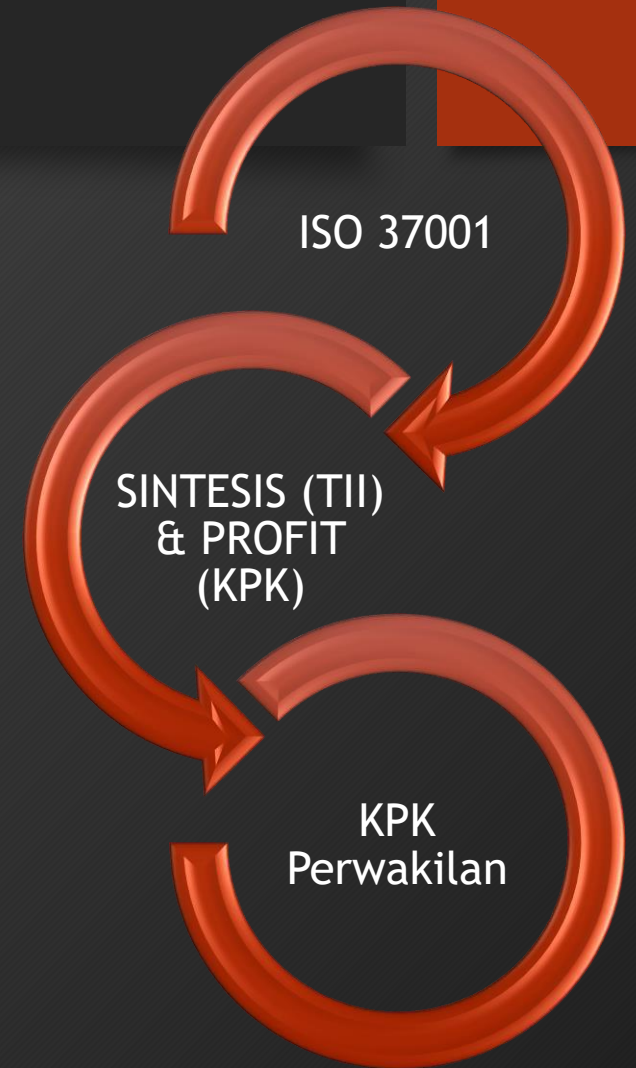
1. <u>TACTICAL ACTION</u> <u>(SHORT TERM)</u> Membangun Sistem Data dan Informasi yang terintegrasi	2. <u>STRATEGIC ACTION</u> <u>(MID TERM)</u> Menutup Titik Rawan Korupsi dan Menyelamatkan Kekayaan Negara	3. <u>SYSTEMATICAL ACTION</u> <u>(LONG TERM)</u> Mengawal Pelaksanaan Kebijakan Pusat & Daerah
<ul style="list-style-type: none">• Integrasi data (spasial & non-spasial):<ul style="list-style-type: none">• SKPD terkait• Eksternal dengan data Instansi terkait & pelaku usaha• Integrasi dengan sistem MPN-G2, INSW, Inatrade, Inaportnet, MPD, PTSP dll → Pengendalian melalui perizinan• Multi Clearance - OSS• Pembangunan One Map One Data (Geoportal ESDM, MOMI, Jakarta Satu)• Target:<ul style="list-style-type: none">• Geoportal One Map One Data• Penegakan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak comply• Penyelamatan aset dan keuangan negara/daerah	<ul style="list-style-type: none">• Monitoring compliance pelaku usaha• Audit Kepatuhan, Spatial, Sosial, Lingkungan dll.• Perbaiki sistem dan regulasi• Koordinasi dan Supervisi permasalahan lintas• Deteksi “Special Case”• Target:<ul style="list-style-type: none">• Breakthrough, kebijakan transisi• Debottlenecking permasalahan lintas	<ul style="list-style-type: none">• Keseuaian dengan UUD 1945 Pasal 33, Nawacita, RPJMD, Renstra PEMDA, dll• Monitoring pelaksanaan RTRW, RZWP3K, KLHS

PENGARUS UTAMAAN ANTI-KORUPSI



Sistem penanggulangan dan pencegahan korupsi di semua sektor, baik sektor public maupun swasta

Rumus Kelestarian:
 $Y = f(X); K=0, G=1$





INOVASI KEPALA DAERAH (*Green Leadership*)

Dari Wawancara Nirwasita Tantra, 2018

1. MENUJU HASIL AKHIR (*OUTCOME*)

- Proses administrasi dianggap urusan internal pemerintahan; yg dilihat solusinya

2. KECEPATAN ATAS RESPON MASYARAKAT

- Meramu antara kebenaran hukum dan dinamika yang sedang berjalan

3. MENDAYAGUNAKAN BERBAGAI JENIS ILMU & PENGETAHUAN

- Dasar pembenaran komprehensif

1. Detail masalah diketahui
2. Langsung berguna bagi masy
3. Ubah penolakan menjadi dukungan
4. Menggunakan teknologi untuk akuntabilitas masy
5. Memilih strategi ~ budget
6. Solusi atas tekanan politik

HAMBATAN: “Terhalang oleh Terang”



INOVASI STRUKTURAL MEWUJUDKAN OUTCOME

Fakta sbg
Tolok Ukur
Kinerja



KOORD BASIS OUTCOME

1. EKONOMI BERKELANJUTAN—Pemda
2. KONSERVASI—KLHK
3. PENDIDIKAN DAN KESEHATAN—Pemda

MEKANISME KOORDINASI

INOVASI UNTUK MENCAPAI GOAL/OUTCOME BERSAMA; MEMFUNGSIKAN KEWENANGAN YG ADA



LANSKAP: KOMODITI, STOCK SDA & INTEGRASI KEWENANGAN

**BIODIVERSITY
DARATAN
HUTAN KONSERVASI**

**BIODIVERSITY
DARATAN
HUTAN LINDUNG**

**KONSERVASI
SUMBER AIR**

HUTAN PRODUKSI

**KERUSAKAN
LAHAN**

**PENCEMARAN
AIR**

**BIODIVERSITY
PERAIRAN**

**BIODIVERSITY
DARATAN**

**EKOSISTEM
PANTAI DAN PESISIR**

**EKOSISTEM
LAUT**

**EKOSISTEM
PULAU KECIL**

SELESAI